

RINGKASAN

Rata-rata angka kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi pertama dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa pada tahun 2012 sampai dengan 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel kredit modal kerja, kredit investasi, etnis, infrastruktur ekonomi, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder di 6 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2003 sampai dengan 2018 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan persamaan data panel dan pengolahan data menggunakan aplikasi *evIEWS*. Keterbaharuan penelitian ini adalah menggunakan variabel etnis, kredit investasi dan kredit modal kerja. Penggunaan ketiga variabel tersebut untuk membuktikan teori lingkaran kemiskinan dapat diputus dengan penyaluran kredit atau diperparah dengan kebijakan etnis yang melarang akan kepemilikan aset tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit modal kerja dan infrastruktur ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, kredit investasi, etnis, infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2003 sampai dengan 2018.

Implikasi dari penelitian ini adalah pertama pemerintah dan lembaga keuangan harus berkerjasama dalam mempermudah dan memperbanyak penyaluran kredit modal kerja kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat miskin. Namun demikian dalam proses penyalurannya harus mempertimbangkan suku bunga yang rendah agar tidak terlalu membebani kreditur. Selain itu, harus diperhatikan kemudahan dalam prosedur pengajuan dan pengawasannya kredit agar pemberian kredit dapat memberikan manfaat bagi kreditur kredit. Kedua pembangunan infrastruktur harus merata dan adil di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada daerah-daerah yang angka kemiskinannya tinggi agar pembangunan infrastruktur dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh penduduk miskin.

Kata Kunci : Kemiskinan, Kredit, Etnis, Infrastruktur

SUMMARY

The average poverty rate in the Special Province of Yogyakarta is the highest compared to other provinces in Java in 2012 to 2018. The study analyzed the impact of working capital credit, investment credit, ethnic, economic infrastructure, education infrastructure, and health infrastructure on poverty in Special Region Province of Yogyakarta. The study used secondary data in 6 districts / cities in the period 2003 to 2018 in the Province of Yogyakarta Special Region. Data analysis using multiple linear regression with panel data equations and data processing using the evIEWS application. The novelty of the research is using ethnic, investment credit and working capital credit on poverty. The use of these three variables to prove the theory of poverty can be broken by channeling credit or exacerbated by ethnic policies that prohibit ownership of land assets.

The results show that working capital credit economic infrastructure have a negative and significant effect on poverty. In addition, investment credit, ethnic, health infrastructure and educational infrastructure have a negative and not significant effect on poverty in the Special Region Province of Yogyakarta in the period 2003 to 2018.

The implication of this research is that the government and financial institutions must collaborate first in facilitating and increasing the distribution of working capital credit to public, especially to the poor. Second, investment credit in medium and large industries must be facilitated in the filing procedure so that credit can provide benefits to creditors and especially be able to create more employment opportunities. Third, the regional government must maintain the policy of land ownership for non-indigenous residents with all land assets owned by the indigenous population so that it can be used as a guarantee of capital in financial institutions. Fourth, health infrastructure must be expanded, especially community health centers in each village, so that people can access health facilities easily. However, regional governments must provide free health services to the poor, so that the health quality of the poor population is maintained.

Keywords: Poverty, Credit, Ethnic, Infrastructure